JADMENT: ***Journal of Administration & Development***
Published by Penerbit Forind
Vol. 3 No. 3 (2026) | Page 645-658
Website: https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment

EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU

Evaluation of Tourism Development Policy in Gunungsari Village Bumiaji District Batu City

Yasinta Walu Hari[1*]
Ignatius Adiwijaja[1]

[*1]Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang

[*]corresponding author:
yusintawaluhari02l@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata secara umum telah mendorong peningkatan aktivitas pariwisata, keterlibatan masyarakat, dan peluang ekonomi lokal. Namun, implementasinya masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur, kebersihan, aksesibilitas, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi pengelolaan. Manfaat ekonomi juga belum sepenuhnya merata karena lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan telah sesuai dengan potensi lokal, tetapi pengembangannya masih memerlukan penguatan pemerataan manfaat, infrastruktur, kapasitas pengelola, dan pengelolaan destinasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci:
Evaluasi kebijakan
Pariwisata
Desa Gunungsari

Keywords:
Policy Evaluation
Tourism
Gunungsari Village

Abstract

This study aims to evaluate the tourism development policy in Gunungsari Village, Bumiaji District, Batu City using six policy evaluation criteria proposed by William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected purposively based on their involvement in and knowledge of tourism development in Gunungsari Village. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The findings indicate that the tourism development policy has generally contributed to increased tourism activities, community involvement, and local economic opportunities. However, its implementation continues to face limitations in facilities and infrastructure, cleanliness, accessibility, human resource capacity, and management coordination. Economic benefits have also not been fully distributed, as they are more strongly experienced by community members directly involved in tourism activities. The study concludes that the policy is appropriate to local potential, but further development requires stronger benefit distribution, infrastructure, management capacity, and sustainable destination management.

© year The Authors. Published by **Penerbit Forind**. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Link: http://assyifa.forindpress.com/index.php/assyifa/index

Submite: 15-07-2026 *Accepted: 01-10-2026* *Published: 20-11-2026*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan wilayah secara berkelanjutan. Di Indonesia, sektor pariwisata terus dikembangkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam, budaya, dan kreativitas masyarakat.

Pengembangan sektor ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan.

Pemerintah melalui berbagai regulasi telah menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan nasional karena memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan, transportasi, jasa, dan industri kreatif (Setiawan, 2022; Baparekraf RI, 2021; Soemardjan, 1977; Kreag, 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Dalam konteks pembangunan daerah, orientasi tersebut menempatkan pemerintah daerah dan pemerintah desa tidak hanya sebagai pelaksana program pariwisata, tetapi juga sebagai aktor yang perlu memastikan bahwa pengembangan destinasi menghasilkan manfaat yang dapat diakses oleh masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak cukup dilihat dari keberadaan objek wisata atau peningkatan aktivitas wisata, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaian antara tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, distribusi manfaat, respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan hasil kebijakan.

Pengembangan pariwisata pada hakikatnya merupakan implementasi kebijakan publik yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut William N. Dunn (2003), keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan melalui aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi tahapan penting untuk menilai kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil implementasi di lapangan. Dalam konteks pembangunan pariwisata, evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi keberhasilan program, hambatan pelaksanaan, serta alternatif perbaikan kebijakan agar pembangunan destinasi wisata mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan (Dunn, 2003; Agustino, 2017; Hanafi & Ma'sum, 2015; Parsons, 2006; Kafrini et al., 2022; Desrinelti, Afifah, & Nurhizrah, 2021). Penggunaan enam kriteria Dunn menjadi relevan karena memungkinkan evaluasi tidak berhenti pada pertanyaan apakah kebijakan telah dilaksanakan, tetapi juga menilai apakah hasil kebijakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, didistribusikan secara memadai, dan dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang tepat.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang berkembang pesat dengan karakteristik wisata alam, budaya, dan agrowisata yang beragam. Salah satu wilayah yang menjadi pusat pengembangan destinasi wisata adalah Kota Batu yang memiliki keunggulan berupa kondisi geografis, iklim, serta kekayaan sumber daya alam. Di antara desa-desa wisata yang berkembang, Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji memiliki potensi agrowisata, wisata alam, wisata petik buah, wisata petik bunga mawar, peternakan sapi perah, Goa Pinus, Goa Pandawa, serta penyediaan homestay yang menjadi daya tarik wisatawan. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal.

Meskipun memiliki keragaman potensi tersebut, keberadaan potensi wisata belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata telah mencapai hasil yang optimal. Pengembangan destinasi masih menghadapi persoalan koordinasi antarpemangku kepentingan, kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta pengelolaan destinasi yang belum optimal. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat pengembangan pariwisata Gunungsari bukan hanya dari sisi potensi yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana kebijakan yang dilaksanakan mampu mengubah potensi tersebut menjadi manfaat yang efektif, efisien, cukup, merata, responsif, dan tepat bagi masyarakat. Permasalahan tersebut sejalan dengan berbagai kajian yang menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata di daerah dapat menghadapi kendala kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, serta koordinasi antaraktor (Gautama et al., 2020; Rahman, 2023; Okto et al., 2024; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata masih menghadapi tantangan implementasi yang berbeda pada setiap daerah. Penelitian Fedro et al. (2023) menekankan pentingnya kebijakan pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan daya tarik wisata dan pendapatan masyarakat. Syamsiar et al. (2020) menemukan bahwa keberhasilan pengembangan industri pariwisata dipengaruhi oleh penguatan kelembagaan, kemitraan, daya saing produk wisata, serta kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Wazni et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi, teknologi informasi, dan pendanaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata bersifat multidimensional dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik lokal. Oleh sebab itu, hasil evaluasi pada satu daerah tidak dapat secara langsung menggambarkan kondisi daerah lainnya, sehingga evaluasi pada tingkat desa menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan bekerja dalam konteks lokal.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan berbagai aspek pengembangan pariwisata, sebagian besar masih berfokus pada implementasi kebijakan, pengembangan industri, maupun aspek input kebijakan. Penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi kebijakan pengembangan pariwisata berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn pada tingkat desa wisata, khususnya di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu, masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kajian mengenai potensi dan implementasi pengembangan pariwisata dengan kebutuhan untuk mengevaluasi hasil kebijakan secara multidimensional pada tingkat desa. Kesenjangan tersebut penting dikaji karena keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh tersedianya potensi wisata, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam menghasilkan manfaat yang nyata, memenuhi kebutuhan masyarakat, mendistribusikan manfaat secara lebih merata, serta merespons persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memposisikan Desa Gunungsari sebagai konteks empiris untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan pariwisata melalui enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai capaian kebijakan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan kebijakan dari adanya aktivitas pariwisata, tetapi juga menelaah bagaimana manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, bagaimana sumber daya dimanfaatkan, serta bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan merespons kebutuhan pengembangan destinasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, serta mengidentifikasi

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan enam kriteria evaluasi William N. Dunn secara terpadu untuk menganalisis kebijakan pengembangan pariwisata pada tingkat desa wisata di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi tidak hanya capaian kebijakan, tetapi juga ketimpangan manfaat, keterbatasan sumber daya, kebutuhan masyarakat, dan faktor kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola pariwisata berbasis potensi lokal dan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan pelaksanaan kebijakan berdasarkan pengalaman, pandangan, dan informasi yang diperoleh dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Penelitian dilaksanakan di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Desa Gunungsari memiliki beragam potensi wisata, antara lain agrowisata, wisata alam, wisata petik buah dan bunga, peternakan sapi perah, serta destinasi wisata lainnya, sekaligus telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan pariwisata yang memerlukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Fokus penelitian mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), yang meliputi enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam kriteria tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis capaian kebijakan pengembangan pariwisata sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya di Desa Gunungsari.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, atau penerimaan manfaat dari kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari. Informan penelitian berjumlah 5 orang, yang terdiri atas perangkat desa, pengelola wisata, masyarakat, dan pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pariwisata.

Pemilihan informan dari unsur pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, sumber daya, dan respons pemerintah terhadap pengembangan pariwisata. Informan dari unsur pengelola destinasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan objek wisata dan pelaksanaan program di tingkat operasional. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha dipilih untuk memperoleh informasi mengenai manfaat, partisipasi, pemerataan, serta pengalaman masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan komposisi tersebut, penelitian memperoleh perspektif dari aktor pemerintah, pelaksana/pengelola, dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi destinasi wisata, fasilitas pendukung, aktivitas pengelolaan, keterlibatan masyarakat, serta kondisi lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Wawancara mendalam

dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan terpilih untuk menggali informasi mengenai enam kriteria evaluasi William N. Dunn serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan. Pertanyaan wawancara diarahkan pada pengalaman dan penilaian informan mengenai capaian kebijakan, penggunaan sumber daya, manfaat yang diterima masyarakat, pemerataan kesempatan, respons pemerintah, serta kesesuaian program dengan kondisi dan kebutuhan Desa Gunungsari.

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi hasil observasi dan wawancara melalui penelaahan dokumen, arsip, foto kegiatan, informasi program, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari. Penggunaan ketiga teknik tersebut dimaksudkan agar informasi mengenai pelaksanaan kebijakan tidak hanya diperoleh dari pernyataan informan, tetapi juga dibandingkan dengan kondisi lapangan dan bukti dokumenter yang tersedia.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi data collection, data condensation, data display, serta conclusion drawing/verification. Pada tahap kondensasi data, informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilah dan dikelompokkan berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian tematik untuk melihat pola, persamaan, perbedaan, serta permasalahan yang muncul pada masing-masing indikator. Tahap penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan secara berulang dengan membandingkan temuan antar-informan dan antar-teknik pengumpulan data sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang memadai.

Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari unsur pemerintah desa, pengelola destinasi wisata, dan masyarakat/pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi konsistensi maupun perbedaan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan. Data yang memiliki kesesuaian antar-sumber dan antar-teknik digunakan sebagai dasar dalam memperkuat interpretasi hasil penelitian.

HASIL

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari menunjukkan capaian yang berbeda pada masing-masing kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Secara umum, kebijakan telah mendorong berkembangnya aktivitas pariwisata dan memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum sepenuhnya merata dan masih terdapat keterbatasan pada aspek sarana prasarana, kapasitas masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pengelolaan destinasi.

Efektivitas Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Keberadaan destinasi wisata membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, kuliner, jasa parkir, usaha wisata, dan kegiatan ekonomi lain yang berkaitan dengan kunjungan wisatawan.

Temuan tersebut diperoleh dari keterangan pemerintah desa, pengelola wisata, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Salah satu informan dari pemerintah desa menjelaskan bahwa

> "pengembangan wisata memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sebelumnya belum berkembang secara optimal."

Sementara itu, informan dari kelompok masyarakat/pelaku usaha menyampaikan:

> "keberadaan wisata memberikan peluang untuk memperoleh tambahan pendapatan melalui kegiatan usaha yang dilakukan di sekitar destinasi."

Hasil observasi juga menunjukkan adanya aktivitas masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata, terutama perdagangan, kuliner, jasa parkir, dan kegiatan pelayanan wisata. Selain manfaat ekonomi, pengembangan wisata juga didukung oleh penyediaan dan peningkatan beberapa fasilitas dasar serta akses menuju lokasi wisata.

Namun demikian, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat fasilitas pendukung yang perlu ditingkatkan, terutama berkaitan dengan kenyamanan wisatawan, kebersihan, tempat parkir, papan informasi, dan sarana pendukung lainnya. Pengelola destinasi menyampaikan:

> "keterbatasan fasilitas tersebut masih menjadi salah satu persoalan dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan."

Dengan demikian, dari aspek efektivitas, kebijakan telah menghasilkan manfaat dan aktivitas pariwisata, tetapi pencapaian tujuan kebijakan masih memerlukan penguatan fasilitas, kualitas pelayanan, dan pengelolaan destinasi.

Efisiensi Kebijakan

Dari aspek efisiensi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan melibatkan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal. Pengembangan pariwisata tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fasilitas, tetapi juga melalui pemanfaatan sumber daya masyarakat, kerja sama dengan pengelola wisata, pelaku UMKM, serta pemanfaatan potensi pertanian dan peternakan sebagai bagian dari aktivitas wisata.

Menurut informan dari pemerintah desa:

> "keterbatasan sumber daya mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi dan fasilitas yang telah tersedia serta melibatkan berbagai pihak dalam pengembangan wisata."

Pengelola wisata juga menyampaikan terkait itu bahwa

> "keterlibatan masyarakat menjadi salah satu cara untuk menjaga agar kegiatan wisata tetap berjalan dengan sumber daya yang tersedia."

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi belum sepenuhnya optimal. Keterbatasan fasilitas seperti toilet umum, tempat berteduh, tempat sampah, dan fasilitas pelayanan lainnya menunjukkan masih adanya kebutuhan terhadap pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Selain itu, pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya dan anggaran masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program lebih transparan dan tepat sasaran.

Hasil wawancara dengan informan terkait pengelolaan menunjukkan bahwa:

> "keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak seluruh kebutuhan fasilitas dapat dipenuhi sekaligus."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan efisiensi bukan hanya berkaitan dengan besar kecilnya anggaran, tetapi juga kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan yang paling prioritas.

Kecukupan Kebijakan

Pada aspek kecukupan, kebijakan pengembangan pariwisata telah memberikan manfaat berupa

terbukanya kesempatan ekonomi dan lapangan usaha bagi masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam perdagangan, kuliner, jasa, dan pengelolaan wisata memperoleh peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonominya.

Informan masyarakat/pelaku usaha menjelaskan bahwa:

> "kegiatan wisata memberikan peluang untuk mengembangkan usaha dan memperoleh tambahan pendapatan."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah memberikan kontribusi terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan ekonomi masyarakat.

Namun, manfaat kebijakan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun wisatawan. Hasil observasi menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap peningkatan kebersihan kawasan, papan informasi, akses transportasi, fasilitas wisata, kapasitas pelaku UMKM, dan promosi destinasi.

Informan pengelola wisata mengungkapkan bahwa:

> "peningkatan jumlah atau aktivitas wisata perlu diikuti dengan peningkatan fasilitas dan kemampuan pengelolaan agar pelayanan kepada wisatawan dapat berjalan lebih baik."

Dengan demikian, kecukupan kebijakan masih bersifat parsial: kebijakan telah menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pendukung pengembangan destinasi.

Pemerataan Manfaat Kebijakan

Pemerataan merupakan salah satu aspek yang menunjukkan persoalan paling jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekonomi pengembangan pariwisata lebih banyak dirasakan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata, seperti pedagang, pemilik usaha kuliner, pengelola destinasi, dan pelaku usaha lainnya.

Sebaliknya, masyarakat yang belum terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata atau berada relatif jauh dari pusat aktivitas wisata memperoleh manfaat yang lebih terbatas. Salah satu informan masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan wisata menyampaikan bahwa:

> "manfaat ekonomi dari kegiatan wisata belum dirasakan secara sama oleh seluruh masyarakat."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan kesempatan untuk berpartisipasi belum secara otomatis menghasilkan pemerataan manfaat. Masyarakat yang memiliki usaha, akses terhadap lokasi wisata, atau keterlibatan langsung dengan pengelola cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh manfaat ekonomi.

> "dari sisi pemerintah desa, upaya pemerataan dilakukan melalui pelibatan masyarakat dan pengembangan potensi lokal seperti pertanian bunga mawar dan peternakan sapi perah."

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu diperluas agar masyarakat yang belum terlibat langsung juga memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi.

Temuan ini menjadi salah satu aspek penting dalam evaluasi kebijakan karena menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan aktivitas wisata belum sepenuhnya identik dengan pemerataan manfaat kebijakan.

Responsivitas Pemerintah

Pada aspek responsivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa relatif terbuka terhadap aspirasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Aspirasi masyarakat disampaikan melalui komunikasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat, termasuk melalui forum musyawarah desa.

Informan dari pemerintah desa menjelaskan bahwa:

> "masukan masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program pengembangan wisata."

Dari sisi masyarakat, informan menyatakan bahwa:

> "pemerintah desa telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi dalam kegiatan pariwisata."

Meskipun demikian, responsivitas tidak hanya dilihat dari adanya ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menindaklanjuti kebutuhan tersebut. Masih ditemukannya persoalan fasilitas, kebersihan, akses, dan kapasitas masyarakat menunjukkan bahwa sebagian kebutuhan belum dapat diselesaikan secara optimal.

Dengan demikian, pemerintah desa telah menunjukkan respons terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi efektivitas respons tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan kapasitas pengelolaan.

Ketepatan Kebijakan

Dari aspek ketepatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa arah pengembangan pariwisata relatif sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa Gunungsari. Pengembangan wisata memanfaatkan potensi alam, pertanian, peternakan, serta aktivitas masyarakat sebagai bagian dari daya tarik desa.

Informan pemerintah desa menjelaskan bahwa:

> "pengembangan pariwisata diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang memang dimiliki oleh Desa Gunungsari sehingga kegiatan wisata dapat berjalan sejalan dengan karakteristik ekonomi masyarakat setempat."

Pengelola wisata juga menunjukkan bahwa:

> "potensi lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi."

Namun, ketepatan arah kebijakan masih perlu diikuti dengan kesiapan fasilitas, kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan destinasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa keterbatasan lahan parkir, kebersihan, tempat sampah, kualitas infrastruktur, serta partisipasi masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu ditangani.

Ringkasan Temuan Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari telah memberikan hasil positif, tetapi tingkat pencapaiannya berbeda pada setiap dimensi. Efektivitas terlihat dari berkembangnya aktivitas pariwisata dan peluang ekonomi masyarakat. Efisiensi terlihat dari upaya memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, meskipun masih terdapat keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Kecukupan terlihat dari manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi.

Persoalan yang relatif menonjol terdapat pada pemerataan manfaat. Masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan masyarakat yang belum terlibat secara langsung. Sementara itu, responsivitas pemerintah terlihat melalui adanya ruang partisipasi dan penyampaian aspirasi, sedangkan ketepatan tercermin dari kesesuaian arah pengembangan wisata dengan potensi lokal Desa Gunungsari.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata telah berjalan dan menghasilkan manfaat, tetapi belum sepenuhnya optimal pada seluruh kriteria evaluasi William N. Dunn. Keberlanjutan kebijakan masih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan pengelola dalam memperbaiki infrastruktur, memperluas keterlibatan masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi

antarpemangku kepentingan, dan memastikan manfaat pengembangan pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan perkembangan kegiatan wisata. Keberadaan destinasi wisata membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan, kuliner, jasa parkir, dan usaha lain yang berkaitan dengan aktivitas wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan telah menghasilkan manfaat yang sesuai dengan salah satu tujuan utama pengembangan pariwisata, yaitu menciptakan aktivitas ekonomi lokal dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari potensi wisata yang dimiliki desa.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan di Desa Gunungsari tidak hanya dapat dilihat dari keberadaan dan berkembangnya objek wisata, tetapi juga dari kemampuan kebijakan menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pariwisata menunjukkan bahwa kebijakan telah menghasilkan keluaran yang relevan dengan tujuan pengembangan ekonomi lokal.

Temuan tersebut sejalan dengan Syamsiar et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dipengaruhi oleh penguatan kelembagaan, kemitraan, daya saing produk wisata, dan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian Fedro et al. (2023) juga menunjukkan pentingnya pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal dalam meningkatkan daya tarik wisata dan manfaat ekonomi masyarakat. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengembangan pariwisata pada tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan kebijakan menghubungkan potensi destinasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Namun demikian, efektivitas kebijakan di Gunungsari belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Masih terdapat keterbatasan fasilitas pendukung, kebersihan, akses, lahan parkir, dan kualitas pelayanan wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan ekonomi belum secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh tujuan pengembangan destinasi telah tercapai. Dengan kata lain, kebijakan telah efektif dalam menciptakan aktivitas wisata dan peluang ekonomi, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek kualitas destinasi dan pelayanan agar manfaat kebijakan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Efisiensi Kebijakan dalam Pemanfaatan Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, melibatkan masyarakat, serta mengoptimalkan potensi lokal. Pelibatan masyarakat dan kerja sama dengan berbagai pihak menjadi salah satu strategi untuk menjaga keberlangsungan kegiatan wisata dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

Menurut Dunn (2003), efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Oleh karena itu, penilaian efisiensi tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat apakah kegiatan dapat dilaksanakan, tetapi juga perlu melihat apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk menghasilkan manfaat kebijakan.

Dalam konteks Gunungsari, pemanfaatan potensi lokal dan keterlibatan masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk strategi efisiensi karena pengembangan wisata

tidak sepenuhnya bergantung pada pembangunan fasilitas baru, tetapi juga memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi yang telah tersedia di desa. Potensi pertanian, peternakan, usaha masyarakat, dan pengelolaan destinasi menjadi bagian dari sumber daya yang dapat mendukung kegiatan pariwisata.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan Wazni et al. (2020) yang menekankan pentingnya sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi, teknologi informasi, dan pendanaan dalam pengembangan pariwisata. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas masih menjadi persoalan. Kondisi toilet, tempat sampah, tempat berteduh, lahan parkir, dan fasilitas pendukung lainnya menunjukkan bahwa optimalisasi sumber daya belum sepenuhnya tercapai.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan efisiensi di Gunungsari bukan semata-mata persoalan keterbatasan anggaran, tetapi juga berkaitan dengan penentuan prioritas penggunaan sumber daya. Ketika fasilitas dasar yang berhubungan langsung dengan kenyamanan wisatawan masih terbatas, maka pengembangan wisata membutuhkan prioritas pengalokasian sumber daya pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan destinasi.

Kecukupan Kebijakan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Pada aspek kecukupan, kebijakan pengembangan pariwisata telah menghasilkan manfaat berupa terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat. Kegiatan perdagangan, jasa, kuliner, dan usaha mikro yang berkembang di sekitar kawasan wisata menunjukkan bahwa pariwisata telah memberikan alternatif aktivitas ekonomi bagi masyarakat.

Dalam kerangka Dunn (2003), kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menimbulkan persoalan. Artinya, sebuah kebijakan dapat dinilai efektif tetapi belum tentu cukup apabila hasil yang diperoleh belum mampu menjawab kebutuhan yang lebih luas.

Temuan penelitian di Gunungsari menunjukkan kondisi tersebut. Kebijakan telah memberikan manfaat ekonomi, tetapi manfaat tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan terpenuhinya kebutuhan pendukung pengembangan destinasi. Masih terdapat kebutuhan terhadap peningkatan kebersihan, papan informasi, akses transportasi, fasilitas wisata, kapasitas pelaku UMKM, dan promosi yang lebih konsisten.

Temuan tersebut memperkuat penelitian Syamsiar et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dengan demikian, kecukupan kebijakan di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyediakan ekosistem pendukung yang memungkinkan aktivitas tersebut berkembang.

Implikasinya, pengembangan pariwisata Gunungsari perlu bergerak dari sekadar pengembangan objek wisata menuju penguatan ekosistem destinasi. Ketika fasilitas dasar, kapasitas pelaku usaha, informasi wisata, dan promosi belum berkembang secara seimbang, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan kebijakan berpotensi tidak berkembang secara optimal.

Pemerataan **Manfaat sebagai Persoalan Utama**

Berbeda dengan efektivitas dan manfaat ekonomi yang menunjukkan kecenderungan positif, hasil penelitian memperlihatkan bahwa aspek pemerataan masih menjadi persoalan. Manfaat ekonomi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata, seperti pedagang, pemilik usaha kuliner, dan pengelola destinasi. Sebaliknya, masyarakat yang belum terlibat secara langsung atau berada relatif jauh dari pusat kegiatan wisata memperoleh manfaat yang lebih terbatas.

Menurut Dunn (2003), pemerataan berkaitan dengan distribusi akibat dan manfaat kebijakan secara adil di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dengan perspektif tersebut, keberhasilan pengembangan pariwisata tidak dapat hanya diukur berdasarkan meningkatnya aktivitas wisata atau manfaat ekonomi secara agregat, tetapi juga berdasarkan siapa yang memperoleh manfaat tersebut.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan akses masyarakat terhadap manfaat pariwisata. Masyarakat yang memiliki usaha atau terlibat langsung dalam destinasi mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak memiliki usaha atau akses langsung terhadap aktivitas wisata memiliki peluang yang lebih terbatas.

Temuan ini mendukung Fedro et al. (2023) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa membuka ruang partisipasi saja belum cukup untuk menjamin pemerataan manfaat. Pemerintah desa juga perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan kelompok masyarakat yang belum terlibat memperoleh akses terhadap peluang ekonomi dan peningkatan kapasitas.

Dengan demikian, persoalan pemerataan di Gunungsari dapat dipahami sebagai persoalan akses terhadap peluang, bukan semata-mata persoalan pembagian pendapatan. Pelatihan, pengembangan usaha masyarakat, keterlibatan dalam rantai pasok pariwisata, pengembangan produk lokal, dan perluasan partisipasi masyarakat dapat menjadi instrumen untuk memperluas distribusi manfaat kebijakan.

Responsivitas Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa relatif responsif terhadap aspirasi masyarakat. Forum musyawarah dan komunikasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi ruang bagi penyampaian kebutuhan dan persoalan pengembangan pariwisata.

Menurut Dunn (2003), responsivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dengan demikian, responsivitas tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan pemerintah menerima aspirasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan merespons kebutuhan tersebut melalui tindakan kebijakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat mekanisme komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan Desrinelti et al. (2021) yang menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik.

Akan tetapi, adanya forum partisipasi belum selalu berarti seluruh kebutuhan masyarakat telah terselesaikan. Masih ditemukannya persoalan infrastruktur, kebersihan, lahan parkir, fasilitas pendukung, dan kapasitas masyarakat menunjukkan adanya jarak antara penyampaian aspirasi dan penyelesaian persoalan. Karena itu, peningkatan responsivitas perlu diarahkan tidak hanya pada penyediaan ruang dialog, tetapi juga pada mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.

Temuan ini menunjukkan pentingnya menghubungkan partisipasi dengan mekanisme pengambilan keputusan dan prioritas program. Aspirasi masyarakat akan lebih bermakna apabila dapat diterjemahkan menjadi program, alokasi sumber daya, dan tindakan yang dapat diamati oleh masyarakat.

Ketepatan Kebijakan dan Kesesuaian dengan Potensi Lokal

Dari aspek ketepatan, kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari relatif sesuai dengan

karakteristik dan potensi lokal. Pengembangan wisata memanfaatkan potensi pertanian, peternakan, wisata alam, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak dibangun secara terpisah dari karakteristik sosial dan ekonomi desa.

Menurut Dunn (2003), ketepatan berkaitan dengan nilai tujuan kebijakan dan kekuatan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pengembangan pariwisata dapat dipandang tepat karena diarahkan pada pemanfaatan potensi yang memang tersedia dan memiliki hubungan dengan kehidupan ekonomi masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan Fedro et al. (2023) yang menekankan pentingnya pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Kesesuaian antara kebijakan dan potensi lokal menjadi modal penting karena memungkinkan pengembangan pariwisata berjalan bersama dengan aktivitas ekonomi yang telah berkembang di masyarakat, bukan menggantikannya.

Meskipun demikian, ketepatan arah kebijakan masih perlu didukung oleh kapasitas implementasi. Keterbatasan lahan parkir, kebersihan, fasilitas pendukung, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat secara konseptual belum otomatis menghasilkan implementasi yang optimal.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketidaksesuaian arah kebijakan dengan potensi Gunungsari, tetapi pada kemampuan menerjemahkan arah tersebut menjadi tata kelola destinasi yang lebih terintegrasi. Pengembangan potensi lokal membutuhkan dukungan infrastruktur, kapasitas pengelola, promosi, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat yang konsisten.

Hasil Evaluasi Kebijakan

Jika keenam kriteria William N. Dunn dianalisis secara bersamaan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari memiliki capaian yang tidak seragam. Efektivitas dan ketepatan menunjukkan kecenderungan positif karena kebijakan telah menghasilkan aktivitas ekonomi dan diarahkan pada pemanfaatan potensi lokal. Efisiensi dan kecukupan telah menunjukkan manfaat, tetapi masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Responsivitas relatif terlihat melalui keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, sedangkan pemerataan menjadi aspek yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata di Gunungsari bersifat parsial. Kebijakan telah mampu menggerakkan aktivitas pariwisata dan menciptakan manfaat ekonomi, tetapi belum sepenuhnya mampu memastikan bahwa manfaat tersebut tersebar secara merata dan didukung oleh fasilitas serta kapasitas pengelolaan yang memadai.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata Gunungsari tidak cukup diarahkan pada peningkatan aktivitas wisata, tetapi perlu memperkuat kualitas tata kelola destinasi, pemerataan akses ekonomi, kapasitas masyarakat, kualitas infrastruktur, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa evaluasi kebijakan pariwisata pada tingkat desa perlu memperhatikan tidak hanya capaian output, tetapi juga distribusi manfaat dan kapasitas kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Implikasi kebijakan dari temuan tersebut adalah perlunya pendekatan pengembangan pariwisata yang lebih terintegrasi antara pemerintah desa, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah. Prioritas perbaikan dapat diarahkan pada peningkatan fasilitas dasar, penguatan kapasitas masyarakat, perluasan kesempatan partisipasi ekonomi, perbaikan promosi, serta mekanisme koordinasi yang memungkinkan berbagai aktor berbagi peran dalam pengembangan destinasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan enam kriteria William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, secara umum telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas pariwisata, keterlibatan masyarakat, dan terbukanya peluang ekonomi lokal. Dari aspek efektivitas dan ketepatan, kebijakan dinilai sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa Gunungsari serta mampu mendorong pengembangan kegiatan pariwisata. Dari aspek efisiensi dan kecukupan, pemanfaatan potensi lokal dan keterlibatan masyarakat telah dilakukan, tetapi masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung, kebersihan, aksesibilitas, serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan destinasi. Aspek pemerataan menjadi salah satu persoalan penting karena manfaat ekonomi pariwisata belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dan cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang terlibat langsung dalam aktivitas pariwisata. Sementara itu, responsivitas pemerintah desa dan pengelola terhadap kebutuhan masyarakat telah terlihat melalui komunikasi dan musyawarah, meskipun tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan masih perlu diperkuat. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Gunungsari bersifat relatif dan belum sepenuhnya optimal. Pengembangan selanjutnya perlu diarahkan pada pemerataan manfaat, penguatan infrastruktur dan fasilitas pendukung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan dan destinasi secara berkelanjutan, serta penguatan koordinasi antaraktor agar kebijakan tidak hanya meningkatkan aktivitas pariwisata, tetapi juga menghasilkan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

REFERENSI

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.

Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi evaluasi kebijakan*. Public Policy Journal, 1(1), 1–15.

Ali, M. (2013). *Pengembangan pendidikan dan pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.

Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan kesehatan: Prinsip dan praktik*. Rajawali Pers.

Choirunnisa, D., [penulis lain belum tersedia dalam naskah]. (2021). Peran pariwisata dalam peningkatan ekonomi masyarakat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 91–98.

Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: Konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia),* 6(1), 83–88. https://doi.org/10.29210/3003906000

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

Gautama, B. P., Yuliawati, A. K., Nurhayati, N. S., Fitriyani, E., & Pratiwi, I. I. (2020). Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(4), 355–369. https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.414

Halimah. (2020). Evaluasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*.

Hanafi, H., & Ma'sum, M. (2015). Kebijakan publik sebagai sistem input, proses dan output. *Jurnal Administrasi Negara*.

Hasan, A. (2016). *Tourism marketing*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.

Herdiana, D. (2018). Kebijakan publik dan implementasinya. *Jurnal Ilmu Administrasi*.

Kafrini, K., [penulis lain belum tersedia dalam naskah]. (2022). Evaluasi kebijakan publik dalam pelayanan pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2024). *Jaringan Desa Wisata (JADESTA): Desa Wisata Gunungsari*.

Kodhyat, H. (1983). *Sejarah pariwisata dan perkembangannya di Indonesia*. Gramedia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R. (2003). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.

Okto, M. A. (2024). Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kota Batu. *Journal Administration and Development (JADMENT), 1*(1), 32–40.

Parsons, W. (2006). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana.

Pendit, N. S. (1986). *Ilmu pariwisata*. Pradnya Paramita.

Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2009). *Sosiologi pariwisata*. Andi.

Priansa, D. J. (2016). *Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia*. Alfabeta.

Priyadi, U. (2016). *Pariwisata syariah*. UPP STIM YKPN.

Rahman. (2023). Pengembangan pariwisata di Jawa Timur. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 62–70.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.

Setyawan, A. (2017). *Kebijakan publik: Teori dan praktik*. Deepublish.

Spillane, J. J. (1982). *Pariwisata Indonesia: Sejarah dan prospeknya*. Kanisius.

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukardi. (2010). *Metodologi penelitian pendidikan*. Bumi Aksara.

Syafiola, M. F., Alfiandi, B., & Indraddin. (2023). Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23*(2), 1628–1632. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3879

Syamsiar, S., [penulis lain belum tersedia dalam naskah]. (2020). Evaluasi kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Wajo. *Jurnal Administrasi Publik*.

Wahab, S. A. (2005). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Bumi Aksara.

Warman, W., [penulis lain belum tersedia dalam naskah]. (2021). Tujuan dan manfaat evaluasi kebijakan. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.

Warsita, B. (2003). *Teknologi pembelajaran*. Rineka Cipta.

Wazni, W., Harirah, M. S. Z., & Darmansyah, R. (2020). Evaluasi input kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Kabupaten Siak. *Sebatik, 24*(2), 178–186. https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1124